

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi Indonesia saat ini semakin jauh dari tingkat kesejahteraan, seperti yang ditunjukkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang sedang dialami beberapa saat lalu. Akibatnya timbul ketimpangan dalam perekonomian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan jumlah pengangguran di masyarakat. Menurut buku *Inequality—What Everyone Needs To Know*, ketimpangan ekonomi dan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kelas, peringkat, kekayaan, pendapatan, dan kewarganegaraan (Galbraith, 2016). Negara berkembang sering mengalami masalah seperti ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Kedua masalah ini menyebabkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah bersaing dengan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (Tambunan, 2001).

Membangun kemandirian adalah tujuan utama setiap pembangunan, termasuk pembangunan pedesaan. Pemerintah dapat membangun daerah pedesaan dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produksi dan keanekaragaman usaha di daerah pedesaan, menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat lembaga yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, dan mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada daerah dan pedesaan untuk menjadi sumber ekonomi regional dan nasional.

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah pembangunan pedesaan. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan basis ekonomi pedesaan melalui berbagai program, tetapi belum ada hasil yang diharapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, yang menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan ekonomi pedesaan. Dalam hal ini, Sandiasa (2017:64) menyatakan bahwa "berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak melibatkan aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri." Pada akhirnya, struktur ekonomi pedesaan tidak berfungsi

dengan baik dan mengakibatkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, yang mengakibatkan mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, pemerintah seharusnya sangat memperhatikan eksistensi desa dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi dengan menyatukan dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Akibatnya, pemerintah menerapkan strategi baru yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi pedesaan dengan mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah salah satu program penting untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Perekonomian desa sering dianggap tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Perekonomian perkotaan. Mendorong gerak ekonomi melalui kewirausahaan desa adalah strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari,2016); upaya untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang didirikan oleh masyarakat desa dan pemerintah (Prabowo, 2014). BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki Desa dan bertugas mengoptimalkan potensi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan sumber daya alam dan manusia. Kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya masih jauh dari harapan. Ini adalah hasil dari kurangnya pemahaman perangkat desa tentang BUMDes. Kewirausahaan atau kewirausahaan adalah kunci keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengelola BUMDes itu sendiri akan sulit jika masyarakat tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Agar masyarakat desa memiliki insting bisnis, jiwa kewirausahaan harus ditanamkan. Pembangunan di tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan selama ini. Kelemahan pembangunan desa disebabkan karena masalah keuangan dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Dalam hal perencanaan ini menggunakan teori tentang keadilan (*equity*) yang pertama kali dikemukakan oleh Zalesnik pada tahun 1958 kemudian dikembangkan oleh (John Stacey Adams, 1963), seorang ahli psikologi perilaku dan tempat kerja yang menerbitkan jurnal *equity theory* terkait motivasi kerja.

Teori ini menjelaskan bagaimana upah dapat memberikan motivasi. Dalam lingkungan kerja, seseorang selalu akan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Ketidakwaiban akan mempengaruhi upayanya untuk bekerja dengan baik. Dalam proses pembangunan, perencanaan Equity sangat penting. Konsep keadilan diharapkan dapat mencegah ketidakadilan dalam pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan biasanya berusaha menyelesaikan masalah masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak perencanaan pembangunan yang hanya berfokus pada suatu kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kelompok lain yang dirugikan dan menggunakan perencanaan yang kurang multidimensional. Akibatnya, sering ditemui adanya pihak yang dirugikan atau mendapat ketidakadilan bahkan justru menimbulkan masalah baru.

BUMDes memungkinkan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional dan tetap bersandar pada potensi asli desa.

Desa Jatipancur, yang terletak di Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon, adalah salah satu desa yang telah memulai program BUMDes. Pemerintah Desa dan penduduk Desa Jatipancur memutuskan untuk membentuk BUMDes Pancur Jaya pada tahun 2017 dan diresmikan pada 20 Januari 2020. Perkebunan Pisang, Tempat Cuci Mobil, dan Kafe adalah keunggulan unit usaha BUMDes Pancur Jaya karena berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Jatipancur.

Perkebunan Pisang di Desa Jatipancur menjadi suatu masalah ketika terdapat lahan yang luas namun tidak produktif di sertai dengan permintaan masyarakat yang tinggi yang menjadikan Desa Jatipancur masih membeli pisang untuk di jual kembali kepada masyarakat luas, melalui BUMDes Pemerintah Desa berinisiatif untuk memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi produktif guna mendongkrak roda perekonomian di Desa Jatipancur dengan memanfaatkan lahan sebesar 9 hektar pada saat ini dan akan terus di perluas hingga 24 hektar sesuai dengan permintaan pasar. Hasil daripada perkebunan pisang ini tidak semuanya di jual kepada masyarakat umum, hasil dari perkebunan pisang akan di sortir untuk dapat dimanfaatkan menjadi produk yang lebih meningkatkan daya jual pisang itu sendiri, Pemerintah Desa memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk dapat menjual produknya melalui BUMDes Mart yang akan dinikmati oleh masyarakat luas. Tempat cuci mobil dan motor merupakan langkah yang strategis melihat peluang dikarenakan di daerah tersebut tidak terdapat tempat

cuci motor mobil untuk masyarakat, di sertai dengan cafe membuat kesan menunggu itu membosankan menjadi menyenangkan disertai dengan menu makanan dan minuman yang menarik menggugah selera pelanggan yang sekedar menunggu kendaraannya yang sedang di cuci maupun masyarakat umum yang datang.

Hal inilah yang menjadi inisiatif masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk membentuk BUMDes dengan nama “Pancur Jaya” dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa Jatipancur tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul "**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT**".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- (1) Pemasalahan ekonomi yang jauh dari tingkat kesejahteraan bahkan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi desa dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan.
- (2) Permasalahan SDM yang kurang memadai dan terampil sehingga berakibat pada ekonomi masyarakat Desa Jatipancur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan di Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

(1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya, memperdalam dan menambah wawasan pengetahuan penulis, serta dapat di jadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama

(2) Kegunaan Praktis

- a) Sebagai sumber acuan informasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung khususnya bagi Pemerintah Desa dan masyarakat yang berperan langsung dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Jatipancur Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon pada umumnya.
- b) Bagi Jurusan Pendidikan Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi keilmuan.

1.6 Definisi operasional

1. Pengelolaan

Pengelolaan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola operasional, sumber daya, dan aset usaha yang dimiliki oleh desa dengan tujuan memingkatkan perekonomian lokal.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BUMDes dalam penelitian ini bernama BUMDes Pancur aya dengan kondisi berjalan aktif programnya namun masih kurang partisipasi dari masyarakat yang menyebabkan kurang optimalnya program BUMDes karena peran masyarakat dalam setiap program BUMDes yang belum sesuai.

3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi Masyarakat merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang dimaksud adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.